



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN KEPAHIANG  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2022. Selain itu Dokumen Rencana Kerja ini dapat dijadikan salah satu acuan pencapaian realisasi kegiatan tahun 2021 dan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu masukan dan saran secara terbuka dapat disampaikan, sebagai bagian dari proses pelaksanaan program dan kegiatan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 ini, semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan berikutnya.

Kepahiang, Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan  
Statistik Kabupaten Kepahiang



**Kushadi Cahyadi, S.Ip.**  
NIP. 19820612-200604 1 009

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II EVALUASI KINERJA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu .....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ...	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun.....	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.....	27
3.2 Pendekatan Program Pencapaian Tujuan.....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V PENUTUP	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, renja berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan lebih detail.

Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program

dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selanjutnya tahapan penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Rencana Kerja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mebidangi tiga urusan yaitu urusan komunikasi informasi, urusan persandian dan urusan statistik. Dinas komunikasi informatika persandian dan statistic sebagai salah satu stakeholder yang mendukung visi misi kepala daerah kabupaten kepahiang, mengemban amanah utuk mendukung misi dua yaitu meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan informasi birokrasi melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan public, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan suplemasi hukum. Dan termasuk dalam OPD yang mendukung prioritas daerah reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan dengan program prioritas peningkatan penerapan pemerintah berbasis elektronik dan keterbukaan informasi publik.

Sistem pemerintah berbasis elektronik (SBPE) merupakan salah satu indikator keberhasilan sasaran kepala daerah meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator nilai indek SPBE ini semua dalam upaya mewujudkan tujuan kepala daerah untuk meningkatkan kualitas dan tata Kelola pemerintahan.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik, dari laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggraan administrasi pemerintah pada pemerintah Kabupaten Kepahiang nomor LHP :28/LHP/XVII/BKL/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, masih banyak item-item dan indikator -indikator yang harus dipenuhi dan diperbaiki.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang didalam nya dimuat bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Pengembangan TIK menduduki posisi penting dalam penyediaan pelayanan penyebarluasan informasi komunikasi, pengembangan TIK dalam Pengelolaan sitem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan

pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e – government secara utuh.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen

pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi (terintegrasi), pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang akan diselaraskan kepada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

Seiring pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era digital, Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang melaksanakan rumpunan urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Statistik dan Persandian yang di dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan berupaya mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam rangka upaya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang akan memperkuat pengembangan dan pemanfaatan jaringan internet, data center dan command center, Terkait hal tersebut maka Dinas Kominfo Kabupaten Kepahiang akan melakukan pengembangan jaringan internet satu pintu (ISP), aplikasi, command center dan data center yang terintegrasi serta penyebarluasan informasi dengan berbagai layanan publik melalui sosialisasi dan workshop serta bimbingan teknis dan Kerjasama dengan media cetak dan online untuk menyebarkan informasi pemerintah daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif, Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepahiang telah berinisiatif untuk

membagun jaringan internet satu pintu, data center dan commend center, Pada tahap awal dipersiapkan peta rencana SPBE dan Arsitektur SPBE yang mengacu pada peta rencana dan arsitektur SPBE pusat, juga software infrastruktur yang memiliki fungsi dasar atau umum, implementasi integrasi data dan teknologi Big Data selain software pendukung lainnya untuk visualisasi Dashboard.

Tersedia pengolahan data beberapa topik sektoral (antara lain : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, inflasi, harga komoditas bahan pokok, pertumbuhan ekonomi, IKM, penanaman modal, kepegawaian, kependudukan, perencanaan pembangunan, perijinan, pendapatan, data indeks kualitas udara, data indeks lahan, dll). Pada fungsi software infrastruktur integrasi data akan diwujudkan melalui datawarehouse yang dapat di setting untuk menampung sinkronisasi data yang terstruktur dari PD baik secara online aplikasi PD maupun manual upload spreadsheet (excel). Sistem aplikasi PD perlu menyediakan link Integrasi (API) agar data dapat ditransfer ke datawarehouse. Selain itu Datawarehouse berfungsi sebagai pusat data sharing yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh PD.

Sedangkan pada fungsi software infrastruktur Big Data yang ada disiapkan sebagai penampung data dalam jumlah besar dari berbagai sumber secara keseluruhan baik data terstruktur (dari sistem datawarehouse atau sumber lainnya) maupun data tidak terstruktur, yang kemudian dimanfaatkan lebih lanjut untuk fungsi analitik (klasifikasi, sentimen analisis, prediktif dan lainnya). Kedepannya didalam sistem ini dibuat model analisis spesifik sesuai masing masing topik untuk melengkapi dan manambah konten dan fungsi Big Data.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Kominfo dalam mewujudkan hal tersebut terus melakukan upaya-upaya melalui 7 (tujuh) Program antara lain;

1. Program Pelayanan Kesekretariatan,
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik,
3. Program Aplikasi Informatika,
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi



Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik sebagai pelaksanaan kewenangan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, maka perlu didukung regulasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan antara lain

- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
- Perpres RI Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
- Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik,
- inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government,
- Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Serta System Keamanan Informasi Pada
- Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepahiang,

juga regulasi-regulasi yang akan kita siapkan menyakut urusan komunikasi informatika statistik dan persandian.

Melalui program dan kegiatan tersebut, diharapkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Kepahiang meningkat lebih baik, sehingga pembangunan di bidang komunikasi informatika persandian dan statistic dapat meningkatkan pengelolaan tata Kelola pemerintahan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepahiang.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 8) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04 );
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14) Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang
- 15) Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan renja merumuskan visi, misi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program pembangunan sector komunikasi informatika persandian dan statistik selama kurun waktu satu tahun, tujuan penyusunan rencana kerja OPD adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kepahiang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.**

###### **1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.**

###### **1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi.**

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD**

###### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

###### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global;
- 4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

### 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Berisikan penjelasan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian rekapitulasi program dan kegiatan

#### BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja**

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, mengacu pada Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Kepahiang yaitu meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi, upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang professional, handal dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum. Pengembangan teknologi informasi, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik menuju *good government, clean government* dan *Smart City*. Berdasarkan penilaian dari deputi kelembagaan dan tata laksana kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nilai indeks SPBE Kabupaten Kepahiang mendapat predikat cukup dengan nilai 2,03, sedangkan untuk indeks keterbukaan publik belum ada penilaian .

Penyampaian informasi pemerintah daerah yang bisa diakses oleh masyarakat lewat media cetak dan media online baik dalam bentuk berita, banner, baliho, spanduk dll bekerja sama dengan media yang ada dari 30 media yang ditargetkan hanya 29 media yang terrealisasi hal ini disebabkan oleh salah satu media resin. Dalam rangka untuk mendukung peningkatan indeks SPBE dan keterbukaan publik berbagai aspek dan indikator tahap demi tahap dengan dukungan anggaran yang ada terus ditingkatkan dari aspek kebijakan, tata kelola dan layanan salah satunya dengan pengembangan jaringan internet yang ditargetkan 10 OPD hanya terealisasi 7 OPD, ketersediaan anggaran yang ada hanya bisa mengakomodir untuk pemasangan jaringan internet di 7 titik spot (OPD), jadi

dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 sudah terpasang 13 titik spot (OPD) jaringan infrastuktur internet yang terpasang.

untuk mendukung kinerja dan berjalannya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan beberapa program kegiatan pada tahun 2020 dan tahun 2021 hasil evaluasi pelaksanaan renja dapat dilihat pada table dibawah ini :



**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021**

Kode	1	2	3	4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			8	Perkiraan Realisasi		11
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja perangkat daerah tahun 2020	Target Kegiatan dan Kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2021)		Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)	
		URUSAN WAJIB BUKAN LAYANAN DASAR									
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK									
10	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	98%	98%	100%			
10	2	1	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun			
10	2	1	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Ktr	1 Ktr	1 Ktr	100	1 Ktr			
10	2	1	Kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan	3 orang	3 orang	3 orang	100	3 orang			
10	2	1	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	26 item	26 item	26 item	100	26 item			
10	2	1	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	32 Item	32 Item	32 Item	100	32 Item			

*Renja Diskominfosantik Kabupaten Kepahiang Tahun 2022*

10	2	10	1	01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	rn, 67.666 le	5 item, 67.000 Lembar	5 item, 67.000 Lembar	100	5 item, 67.000 Lembar				
10	2	10	1	01.12	Kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100	8 Jenis				
10	2	10	1	01.14	Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	100	19 Jenis				
10	2	10	1	01.15	Kegiatan penyediaan barang bacaan dan peraturan perUlan	Jumlah bahan bacaan	4 Item	4 Item	4 Item	100	4 Item				
10	2	10	1	01.17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	4 Item	4 Item	4 Item	100	4 Item				
10	2	10	1	01.18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun				
10	2	10	1	01.19	Kegiatan penyediaan jasa tenaga kontrak	Jumlah tenaga kontrak/THL	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100	4 Orang				
10	2	10	1	2	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang tersedia</b>	100 %	100 %	100 %	100	100 %				
10	2	10	1	02.07	Kegiatan pengadaan Peningkatan gedung Kantor	Jumlah pengadaan peningkatan gedung kantor	-	-	-	-	-				
10	2	10	1	02.09	Kegiatan pengadaan peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-				
10	2	10	1	02.22	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	-	-	-	-	-				

*Renja Diskominfosantik Kabupaten Kepahiang Tahun 2022*

10	2	10	1	02.24	Kegiatan pemeliharaan rambu/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang berpelihara	4 Unit roda 4, 3 unit roda 2	4 Unit roda 4, 3 unit roda 2	3 Unit roda 4, 3 unit roda 2	100	4 Unit roda 4, 3 unit roda 2	-	-	-	-
10	2	10	1	02.28	Kegiatan pemeliharaan rambu/berkala pertengkiapan gedung kantor	pemeliharaan rambu/berkala pertengkiapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10	1	1	20	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Jumlah Pemanfaatan dan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10	1	1	20.01	Kegiatan Government Resources Management System (GRMS)	Jumlah sarana dan prasarana (server dll) dan OPD yang menerapkan Aplikasi pemerintah berbasis elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10	1	1	20.02	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah kegiatan LPSE dalam lingkup Pemda Kepahiang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10	1	1	20.03	Kegiatan pengadaan CCTV untuk jaringan teknologi lalu lintas	Jumlah CCTV terpasang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10	1	1	20	<b>Program Penguatan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>	<b>persentase penguatan komunikasi dan informasi</b>	18	10	7	70%	18	-	-	-	-
2	10	1	1	20.01	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah OPD dan ruang publik yang menggunakan jaringan internet atau Pribu	18	10	7	70%	18	-	-	-	-
2	10	1	1	20	<b>Program Destinasi Informadke dan Komunikasi Publik</b>	<b>Jumlah kesiapan informasi dan komunikasi publik</b>	30	30	30	100%	30	-	-	-	-
2	10	1	1	20.01	Pengujian dan Pengembangan Media Center Kabupaten Kepahiang	Jumlah media cetak dan online yang memuat informasi pemerintah daerah	30	30	30	100%	30	-	-	-	-

*Renja Diskominfoantik Kabupaten Kepahiang Tahun 2022*

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang**

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang sebagai lembaga teknis bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik daerah dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek yang profesional, mampu menyusun dan menyampaikan informasi dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata untuk keselarasan pembangunan daerah.

Untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Kabupaten Kepahiang melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan program tingkat daerah Kabupaten Kepahiang menjadi mutlak.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan Komunikasi, dan Informatika, Urusan Persandian dan Statistik, Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 18 Tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Kabupaten Kepahiang didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana dan dituntut mampu memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan teknologi komunikasi informasi yang berkualitas, akurat, efisien dan mewujudkan pemerataan

percepatan pengelolaan penyediaan pelayanan informasi sehingga dapat diakses guna untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kepahiang.

Indeks SPBE merupakan hasil evaluasi SPBE tahun berjalan dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal instansi pusat/pemerintah daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator eksternal kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi dan birokrasi yang meliputi beberapa aspek dan domain :

1. Kebijakan meliputi aspek kebijakan tata Kelola dan kebijakan layanan dengan indikator tim pengarah, proses bisnis, rencana induk, anggaran, pusatdata, integrasi aplikasi, aplikasi umum, naskah dinas, kepegawaian, penganggaran, keuangan, akuntabilitas, kinerja pengadaan, pengaduan publik, JDIH, WBS, dan pelayanan publik
2. Tata Kelola meliputi aspek kelembagaan, startegi dan perencanaan dan TIK dengan indikator Tim pengarah, proses bisnis, rencana induk, anggaran, pusat data, integritas aplikasi dan aplikasi umum.
3. layanan meliputi aspek layanan adpem dan layanan public dengan indikator naskah dinas, kepegawaian, perencanaan, penganggaran, keuangan, akuntabilitas kinerja, pengadaan, pengaduan public, JDIH, WBS, pelayanan public.

Dalam pengelolaan SPBE Kabupaten Kepahiang Kepala Daerah dan Sekretrias Daerah bertanggungjawab secara langsung, Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik secara khusus menangani SPBE yang melibatkan stakeholdesr lain.

Indek keterbukaan public sampai saat ini belum dilakukan evaluasi baik secara internal maupun eksternal oleh karena itu target kinerja masih mengacu pada target kinerja program kegiatan, pada tahun anggaran 2021 akan dilaksanankan bimtek pejabat pengelola informasi daerah (PPID) dan bimtek Statistik Sektoral untuk Organisasi Perangkat Daerah dengan harapan dapat meningkat pengelolaan informasi pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai wacana dan bahan serta data pembangunan daerah Kabupaten kepahiang.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik  
Kabupaten Kepahiang

No	Indikator (IKU<SPM<IKK)	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Jumlah Jaringan	-	-	1	1	1	-	1	1	1	(ISP/Kepahiang Net)
2	Jumlah Surat Kabar/Nasional/Lokal	-	-	30	30	30	-	29	30	30	
3	Jumlah website perangkat daerah	-	-	5	10	20	5	5	10	20	
4	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan Internet	-	-	10	10	18	-	6	7	15	

### **2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2021. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dirumuskan melalui Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang. Adapun permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya variabel pada domain tata kelola SPBE
2. Belum terpenuhinya variabel indikator tata Kelola SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi
3. Belum adanya pemeringkatan badan public
4. Rendahnya penyediaan informasi public
5. Belum optimalnya jangkauan akses komunikasi informasi
6. Kurangnya dokumen data statistic sectoral daerah yang terintegrasi dengan Sim single data (SDS)
7. Pemenuhan variabel keamanan informasi masih belum optimal
8. Pengelolaan informasi/berita berklasifikasi belum berjalan secara optimal.
9. Kinerja, peran dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang masih rendah karena kurangnya SDM yang handal

10. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik masih kurang
11. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah di tingkat kabupaten yang belum maksimal.
12. Peningkatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang belum maksimal
13. Peningkatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah kabupaten yang belum maksimal
14. Pengelolaan ketersediaan data statistic sectoral yang dapat diakses secara mudah dan cepat belum dilaksanakan.
15. Peningkatan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi daerah kabupaten belum berjalan dan dilaksanakan secara efisien.

Isu-isu strategis baik secara nasional maupun daerah harus menerapkan, meningkatkan dan progres dari permasalahan-permasalahan diatas harus dicapai dengan dukungan SDM, sarana prasarana dan ketersediaan anggaran dari program kegiatan yang akan dilaksanakan dimana isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Ketersediaan informasi dan komunikasi akurat guna mendukung pencitraan, pembangunan daerah dan akses masyarakat guna mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
2. Peningkatan pengelolaan domain dan subdomain pemerintah daerah kabupaten
3. meningkatkan akses terintegrasi atau pengelolaan e-government guna memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih
4. Ketersediaan bank data/statistic sectoral sebagai acuan dan kebutuhan setiap item data dalam pembangunan daerah
5. Pengelolaan persandian guna untuk pengamanan informasi daerah



#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, dan Peraturan Bupati Kepahiang nomor 18 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komunikasi Informatika Persandian dan Statistic Kabupaten Kepahiang dimana terdapat perubahan struktur OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sehingga memberikan dampak perubahan pada tupoksi OPD. Review program/kegiatan yang akan dilaksanakan demi mendukung kelancaran tugas pokok fungsi dinas sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 12.3.  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Kepahiang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo PS	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	98%	2.998.157.408	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo PS	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	98%	3.208.756.808
1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo PS	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	95.326.000	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo PS	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	95.344.000
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kominfo PS	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	95.326.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kominfo PS	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	95.344.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo PS	Jumlah Dokumen Keuangan	2 Dokumen	2.109.357.408	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo PS	Jumlah Dokumen Keuangan	2 Dokumen	2.309.357.408
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo PS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang	2.104.357.408	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo PS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang	2.304.357.408
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Kominfo PS	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Kominfo PS	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo PS	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian	90%	52.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo PS	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian	90%	52.600.000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Kominfo PS	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	52.600.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Kominfo PS	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	52.600.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo PS	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95%	448.464.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo PS	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95%	456.545.400
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	4.864.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.330.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	70.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	70.000.000
	penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.000.000	penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.300.000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	72.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	79.915.400
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	30.000.000	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	30.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 Paket	38.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kominfo PS	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 Paket	38.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kominfo PS	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	28 laporan	230.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kominfo PS	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	28 laporan	230.000.000
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Kominfo PS	PersentasePenyediaan jasa penunjang	90%	38.150.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Kominfo PS	PersentasePenyediaan jasa penunjang	90%	38.150.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Kominfo PS	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	2.150.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Kominfo PS	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	2.150.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kominfo PS	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	36.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kominfo PS	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	36.000.000
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Kominfo PS	PersentasePenyediaan jasa penunjang	90%	254.260.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Kominfo PS	PersentasePenyediaan jasa penunjang	90%	256.760.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Kominfo PS	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	7 Unit	149.260.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Kominfo PS	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	7 Unit	149.260.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Kominfo PS	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	5.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Kominfo PS	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	7.500.000
	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Kominfo PS	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Kominfo PS	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1 Unit	100.000.000
	Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika					Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				
B	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kepahiang	1. Persentase dokumen pembangunan daerah yang dipublikasi	45%	1.250.000.000	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kepahiang	1. Persentase dokumen pembangunan daerah yang dipublikasi	45%	1.447.444.600
			2. Persentase OPD yang meneruskan informasi ke PPID untuk dipublikasikan	45%				2. Persentase OPD yang meneruskan informasi ke PPID untuk dipublikasikan	45%	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepahiang	1. Persentase dokumen pembangunan daerah yang dipublikasi	45%	1.250.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepahiang	1. Persentase dokumen pembangunan daerah yang dipublikasi	45%	1.447.444.600
			2. Persentase OPD yang meneruskan informasi ke PPID untuk dipublikasikan	45%				2. Persentase OPD yang meneruskan informasi ke PPID untuk dipublikasikan	45%	
	Monitoring opini dan aspirasi publik	Kab. Kepahiang	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	15 Dokumen	100.000.000	Monitoring opini dan aspirasi publik	Kab. Kepahiang	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	15 Dokumen	140.000.000

Renja Diskominfo Santik Kabupaten Kepahiang Tahun 2022

	Pengelolaan media komunikasi publik	Kab. Kephahi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan media komunikasi publik	Kab. Kephahi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1 Dokumen	100.000.000
	Pelayanan informasi publik	Kab. Kephahi	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12 Dokumen	150.000.000	Pelayanan informasi publik	Kab. Kephahi	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12 Dokumen	225.000.000
	Layanan Hubungan Media	Kab. Kephahi	Jumlah layanan hubungan media	50 Layanan	900.000.000	Layanan Hubungan Media	Kab. Kephahi	Jumlah layanan hubungan media	50 Layanan	982.444.500
C	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Kephahi	Persentase ketersediaan Infrastruktur TIK	43%	Rp 2.900.000.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Kephahi	Persentase ketersediaan Infrastruktur TIK	43%	Rp 3.000.000.000
			Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	43%				Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	43%	
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Kephahi	Persentase penggunaan Nama domain dan sub domain yang telah ditetapkan di lingkup pemerintah Daerah	50%	Rp 1.000.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Kephahi	Persentase penggunaan Nama domain dan sub domain yang telah ditetapkan di lingkup pemerintah Daerah	50%	Rp 1.100.000.000
	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah Daerah	Kab. Kephahi	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	25 Unit	Rp 1.000.000.000	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah Daerah	Kab. Kephahi	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	25 Unit	Rp 1.100.000.000
2	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kephahi	Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	35%	Rp 1.900.000.000	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kephahi	Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	35%	Rp 1.900.000.000
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kephahi	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	2 Dokumen	Rp 1.000.000.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kephahi	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	2 Dokumen	Rp 1.000.000.000
	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Kab. Kephahi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	2 Dokumen	Rp 150.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Kab. Kephahi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	2 Dokumen	Rp 150.000.000
	Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Kab. Kephahi	Jumlah Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	3 Unit	Rp 250.000.000	Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Kab. Kephahi	Jumlah Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	3 Unit	Rp 250.000.000
	Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kephahi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Rp 500.000.000	Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kephahi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Rp 500.000.000

	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
D	Program Penyelenggaraan Statistis Sektoral	Kab. Kephahiing	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	52%	295.000.000	Program Penyelenggaraan Statistis Sektoral	Kab. Kephahiing	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	52%	175.000.000
1	Penyelenggaraan Statistis Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kephahiing	Kab. Kephahiing	1. Persentase OPD yang menggunakan ketersediaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kephahiing 2. Persentase OPD yang menggunakan ketersediaan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Kephahiing	72%	295.000.000	Penyelenggaraan Statistis Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kephahiing	Kab. Kephahiing	1. Persentase OPD yang menggunakan ketersediaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kephahiing 2. Persentase OPD yang menggunakan ketersediaan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Kephahiing	72%	175.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistis Sektoral	Kab. Kephahiing	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	3 Dokumen	295.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistis Sektoral	Kab. Kephahiing	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	3 Dokumen	175.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Kephahiing	Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi >30 %	32%	250.000.000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Kephahiing	Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi >30 %	32%	250.000.000
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Kephahiing	Persentase perangkat daerah yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal atau akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis	32%	250.000.000	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Kephahiing	Persentase perangkat daerah yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal atau akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis	32%	250.000.000
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten kephahiing	Kab. Kephahiing	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi perangkat daerah yang ditetapkan	2 Kebijakan	250.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten kephahiing	Kab. Kephahiing	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi perangkat daerah yang ditetapkan	2 Kebijakan	250.000.000

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan sedapat mungkin di implementasikan oleh OPD terkait serta di akomodasikan dalam Rencana Kerja OPD.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi serta mendukung system pembangunan daerah.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten kepahiang mempunyai kewenangan di bidang urusan komunikasi informasi, persandian dan statistik, Sektor Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik merupakan bagian integral dari kebijakan Pembangunan Nasional pada dasarnya mempunyai tujuan penguatan konektivitas dan pemerataan dan stabilitasi pertahanan dan keamanan Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan yang ada di daerah harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Nasional, sehingga mampu menjamin kesesuaian pelaksanaan pembangunan, baik antar daerah/wilayah maupun antar sektor, diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang efektif, Efisien berbasis Teknologi Informatika menuju masyarakat Kepahiang Yang maju, mandiri dan sejahtera, dan berdaya saing, konsep perencanaan pembangunan infrastruktur sektor komunikasi harus terintegrasi dengan konsep pembangunan sektor-sektor lainnya, upaya memacu laju perkembangan sektor-sektor lain melalui kemudahan akses terhadap informasi.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai Lembaga Teknis Daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik dalam melaksanakan program/kegiatan sebagai upaya mendukung dan mewujudkan visi misi pemerintah daerah kabupaten kepahiang, dan mendukung rancangan prioritas nasional untuk mencapai hal tersebut di atas, maka dirumuskan langkah-langkah strategis yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi
2. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
4. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah di tingkat kabupaten
5. Meningkatkan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten
6. Peningkatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah kabupaten
7. Pengelolaan ketersediaan data statistic sectoral yang dapat diakses secara mudah dan cepat
8. Peningkatan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi daerah kabupaten

Perumusan tujuan sasaran OPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagaimana tertera pada table dibawah ini :



Tabel 3.1.

## Prioritas dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD (Outcome)
1	Meningkatnya kualitas layanan dan tata Kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Indeks E-Government (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan layanan pemerintah berbasis elektronik	Persentase regulasi yang disusun dalam rangka pelaksanaan SPBE
					Persentase layanan pemerintah berbasis elektronik
				Meningkatnya keterbukaan informasi publik	indeks keterbukaan informasi publik
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas data statistik setoral yang berkualitas	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
				Meningkatnya tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	Persentase kenaikan tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian

Tabel 3.2.

## Tujuan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target Kinerja Tujuan OPD Tahun 2022
1	Meningkatnya pelaksanaan e-Government (SPBE)	Nilai indek e-government (SPBE)	2,1
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	indeks keterbukaan informasi public	60
3	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terkelola	52%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Persandian	Nilai tingkat kepatuhan penyelenggaraan urusan persandian	16

### 3.3 Pendekatan Program Pencapaian Tujuan

Dengan ditetapkannya visi dan misi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang tentunya ada tujuan yang harus dicapai. Adapun tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dalam mengembangkan visi misi adalah :

1. Menyediakan sarana prasarana teknologi informasi untuk mendukung seluruh pendayagunaan e-government.
2. Meningkatkan pendayagunaan teknologi komunikasi informasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih

3. Mempercepat proses pelayanan public yang terintegrasi
4. Menyediakan informasi dan data yang berguna dan mendukung peningkatan pembangunan Kabupaten Kepahiang
5. Meningkatkan akselerasi teknologi informasi;
6. Meningkatkan kualitas teknologi

#### BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya menunjang pencapaian visi misi kepala daerah dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kemudahandan ketersediaan komunikasi informasi dan pelayanan public, keamanan juga ketersediaan satu data statistik sectoral, dan peningkatan, pengembangan optimalisasi pengelolaan SPBE guna mendukung pembangunan daerah kabupaten kepahiang dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta akses masyarakat terhadap media, serta menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Nomor : 28/LHP/XVIII.BKL/12/2020 Tanggal 18 Desember 2020 tentang kinerja atas efektifitas system pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah pada pemerintah Kabupaten Kepahiang oleh karena itu dalam hal ini diperlukan penambahan anggaran padan tahun anggaran 2022.

Pada Tahun 2022 , Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang akan menjalankan program dan kegiatan, rekapitulasi program kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran OPD	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya pengelolaan layanan pemerintah berbasis elektronik	Program : Aplikasi Informatika Kegiatan : 1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub. Domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Pengelolaan e-government di Lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota

2	Meningkanya keterbukaan informasi public	Program : informasi dan komunikasi publik Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data statistik setoral yang berkualitas	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan pemerintah daerah kabupaten
4	Meningkatnya tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	Program : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Kegiatan : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

Program kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan kebutuhan dana (pagu indikatif ) dapat dilihat pada table 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 16 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Dinas Kominfo PS	<b>98%</b>	<b>2.998.157.408</b>	APBD		<b>98%</b>	<b>3.297.973.149</b>	
2 16 01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dinas Kominfo PS	3 Dokumen	95.326.000			5 Dokumen	104.858.600	
2 16 01	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kominfo PS	2 Laporan	95.326.000	APBD		2 Laporan	104.858.600	
2 16 01	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Keuangan</b>	Dinas Kominfo PS	<b>2 Dokumen</b>	<b>2.109.357.408</b>			<b>2 Dokumen</b>	<b>2.320.293.149</b>	
2 16 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Kominfo PS	27 Orang	2.104.357.408	APBD		27 Orang	2.314.793.149	
2 16 01	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Kominfo PS	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.500.000	
2 16 01	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan administrasi kepegawaian</b>	Dinas Kominfo PS	<b>90%</b>	<b>52.600.000</b>			<b>90%</b>	<b>57.860.000</b>	
2 16 01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Kominfo PS	5 Orang	52.600.000	APBD		5 Orang	57.860.000	
2 16 01	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi umum</b>	Dinas Kominfo PS	<b>95%</b>	<b>448.464.000</b>			<b>95%</b>	<b>493.310.400</b>	
2 16 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Kominfo PS	1 Paket	4.864.000	APBD		1 Paket	5.350.400	

Renja Diskominfo Santik Kabupaten Kepahiang Tahun 2022

2	16	01	1.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Kominfo PS	4 Paket	70.000.000	APBD		4 Paket	77.000.000
2	16	01	1.06	03	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas Kominfo PS	1 paket	3.000.000	APBD		1 paket	3.300.000
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Kominfo PS	3 Paket	72.600.000	APBD		3 Paket	79.860.000
2	16	01	1.06	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Kominfo PS	2 Paket	30.000.000	APBD		2 Paket	33.000.000
2	16	01	1.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kominfo PS	4 Paket	38.000.000	APBD		4 Paket	41.800.000
2	16	01	1.06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Kominfo PS	28 laporan	230.000.000	APBD		28 laporan	253.000.000
2	16	01	1.07		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	PersentasePenyediaan jasa penunjang	Dinas Kominfo PS	90%	38.150.000			90%	41.965.000
2	16	01	1.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Kominfo PS	1 Laporan	2.150.000	APBD		1 Laporan	2.365.000
2	16	01	1.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kominfo PS	12 Laporan	36.000.000	APBD		12 Laporan	39.600.000
2	16	01	1.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	PersentasePenyediaan jasa penunjang	Dinas Kominfo PS	90%	254.260.000			90%	279.686.000
2	16	01	1.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Dinas Kominfo PS	7 Unit	149.260.000	APBD		7 Unit	164.186.000
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Kominfo PS	8 Unit	5.000.000	APBD		8 Unit	5.500.000
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Dinas Kominfo PS	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	110.000.000

Renja Diskominfoantik Kabupaten Kepahiang Tahun 2022

16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika												
16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik				Kab. Kepahiang		35%	1.250.000.000	APBD		45%	1.265.000.000	
16	02	1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			Kab. Kepahiang		35%	1.250.000.000	APBD		45%	1.265.000.000	
16	02	1.01	02	Monitoring opini dan aspirasi publik		Kab. Kepahiang		12 Dokumen	100.000.000	APBD		15 Dokumen	110.000.000	
16	02	1.01	05	Pengelolaan media komunikasi publik		Kab. Kepahiang		1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen		
16	02	1.01	06	Pelayanan informasi publik		Kab. Kepahiang		12 Dokumen	150.000.000	APBD		12 Dokumen	165.000.000	
16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media		Kab. Kepahiang		45 Layanan	900.000.000	APBD		50 Layanan	990.000.000	



2	16	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK	Kab. Kephahiang	35%	Rp 2.900.000.000	APBD	43%	Rp 3.240.000.000
					Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik		35%		APBD	43%	
2	16	03	1.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase penggunaan Nama domain dan sub domain yang telah ditetapkan di lingkup pemerintah Daerah	Kab. Kephahiang	40%	Rp 1.000.000.000	APBD	50%	Rp 1.150.000.000
2	16	03	1.01	Penyelenggaraan sistem jaringan Intra pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Kephahiang	20 Unit	Rp 1.000.000.000	APBD	25 Unit	Rp 1.150.000.000
2	16	03	1.02	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan pemerintah berbasis elektronik	Kab. Kephahiang	30%	Rp 1.900.000.000	APBD	35%	Rp 2.090.000.000
2	16	03	1.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Kab. Kephahiang	2 Dokumen	Rp 1.000.000.000	APBD	2 Dokumen	Rp 1.100.000.000
2	16	03	1.02	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Kab. Kephahiang	2 Dokumen	Rp 150.000.000	APBD	2 Dokumen	Rp 165.000.000
2	16	03	1.02	Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Kab. Kephahiang	2 Unit	Rp 250.000.000	APBD	3 Unit	Rp 275.000.000
2	16	03	1.02	Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kephahiang	2 Dokumen	Rp 500.000.000	APBD	2 Dokumen	Rp 550.000.000

2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral															324.500.000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kepahiang															324.500.000	
2	20	02	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral															324.500.000	
2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi																275.000.000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah																275.000.000
2	21	02	2.01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten kepahiang																275.000.000
<b>JUMLAH</b>																					
																				Rp	8.402.473.149

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2022 dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan urusan komunikasi informatika, persandian dan statistik di Pemda Kabupaten Kepahiang.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan dapat diimplementasikan dan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan guna mendukung misi pemerintah maju mandiri dan sejahtera.

Kepahiang, Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang

